

## **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (EMKM) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**B**uku yang berjudul “Penerapan SAK EMKM dalam Penyajian Laporan Keuangan UMKM” telah disesuaikan dengan model pembelajaran di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Buku ini diproyeksikan untuk kebutuhan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan fakultas lain yang mempelajari Penerapan SAK EMKM.



**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)  
ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (EMKM) DALAM  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM)**

**Oleh:**

**AHMAD MUKOFFI  
CAKTI INDRA GUNAWAN  
MARTA LUSITA**

**International Research and Development for Human Beings**

**Malang**

**2018**

**Penulis** : **Ahmad Mukoffi, SE., M.SA.**  
**Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D**  
**Marta Lusita**  
**ISBN** : **978-602-6672-65-0**  
**Editor** : **Dr. Cahyo Sasmito, SH., M.Si.**  
**Layout & Cover** : **Bayu Febri Basudewo**

Cetakan Pertama, Februari 2018

Diterbitkan oleh:



**CV. IRDH (Research & Publishing)**  
**Anggota IKAPI No. 159-JTE -2017**  
**Office: Jl. A. Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto**  
**New Villa Bukit Sengkaling C9 No.1 Malang**  
**HP. 081 357 217 319 WA. 089 621 424 412**  
**www.irdhcenter.com**  
**email: irdhresearch@gmail.com**

Sanksi Pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar ini bisa diselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul “Penerapan SAK EMKM dalam Penyajian Laporan Keuangan UMKM” telah disesuaikan dengan model pembelajaran di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Buku ini diproyeksikan untuk kebutuhan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan fakultas lain yang mempelajari Penerapan SAK EMKM.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku ajar ini khususnya kepada LPPM Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI), Fakultas Ekonomi UNITRI dan pihak lain yang mendorong terselesainya buku ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang telah memberikan fasilitas dana hibah buku ajar DIKTI 2018.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak, penulis buka selebar-lebarnya. Akhirnya, semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ilmiah di Indonesia dan mahasiswa pada khususnya.

Malang, Februari 2018

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Definisi SAK EMKM .....	1
1.2 Ruang Lingkup SAK EMKM .....	4
1.3 Ruang lingkup Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (“ED SAK EMKM”).....	5
1.4 Laporan Posisi Keuangan Ruang Lingkup.....	16
1.5 Manfaat Dari Adanya Suatu Standard Global.....	27
BAB 2 SEJARAH SAK DAN SAK EMKM .....	34
2.1. Sejarah Standar Akuntansi Diluar Negeri .....	34
2.2 Enam Sistem Akuntansi Nasional.....	36
2.3 Sejarah Di Indonesia .....	46
2.4 Perkembangan Pendidikan Akuntansi Di Indonesia .....	48
BAB 3 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.....	58
3.1 Definisi UMKM.....	58
3.2 Landasan Hukum UMKM .....	61
3.3 Perkembangan UMKM Dan Landasan Hukum UMKM	
BAB 4 LAPORAN KEUANGAN UMKM.....	72
4.1. Definisi Laporan Keuangan .....	72
4.2 Macam – Macam Laporan Keuangan .....	74
4.3 Prosedur Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan Sak EMKM .....	78
BAB 5 PANDUAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK UMKM .....	87

5.1. Panduan Membuat Laporan Keuangan Untuk Pemula .....	87
5.2 Arus Kas.....	88
5.3 Laporan Rugi Laba.....	90
5.4 Neraca .....	91
<b>BAB 6 PANDUAN LAPORAN KEUANGAN UMKM.....</b>	<b>92</b>
6.1. Laporan Keuangan Untuk Skala Kecil.....	92
6.2 Tujuan laporan keuangan .....	94
6.3 Penyajian Laporan Keuangan .....	96
6.4 Ketentuan Transisi .....	101
<b>BAB 7 PANDUAN LAPORAN KEUANGAN (SAK EMKM).....</b>	<b>103</b>
7.1. Panduan Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM .....	103
7.2 Posisi Laporan Keuangan.....	104
<b>BAB 8 PANDUAN LAPORAN KEUANGAN SAK EMKM .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>124</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>126</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>127</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Definisi SAK EMKM**

Di pertengahan tahun 2015 IAI menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM). Beberapa riset yang pernah dilakukan juga menemukan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh umkm walaupun persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK EMKM masih didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari rerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana yang kita pelajari dalam SAK konvergensi IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional). Entitas yang laporan keuangannya telah menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, tentunya kepatuhan ini dapat dilihat jika entitas benar-benar telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM ini secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa.

Sesungguhnya EMKM merupakan suatu bagian dari kondisi ekonomi di suatu negara. Tak terkecuali EMKM yang begitu berperan terhadap perekonomian indonesia bahwa, di negeri ini EMKM memiliki jumlah yang lebih banyak daripada perusahaan terbuka. Hal

ini terbukti pada saat krisis moneter tahun 1997-1998, terbukti bahwa emkm adalah penolong bagi indonesia dalam stabilisasi keadaan ekonomi yang ada. Tidak hanya itu, emkm juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Hal ini sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 Bab III Pasal V yang berbunyi: *“Meningkatkan Peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dalam Pembangunan Daerah, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Rakyat Dari Kemiskinan.”* dalam hal pemisahan kepentingan, dalam SAK EMKM perlu dipisahkan secara jelas antara entitas bisnis dan entitas lainnya sebagaimana yang tertuang dalam konsep entitas bisnis. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan suatu standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan EMKM perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. Misalnya SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga umkm cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Sehingga teknik pengukuran biaya persediaan digunakan metode biaya standar atau metode eceran demi mendapatkan kemudahan. Hal- hal lainnya yang terdapat dalam sak emkm ini adalah mengenai saling hapus. Saling hapus aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh sak emkm. Misalnya, jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap secara neto. Dalam menyajikan laporan keuangan, entitas menyajikan secara wajar informasi yang diungkapkan untuk mencapai tujuan relevan, representatif yang tepat,

keterbandingan dan keterpahaman dengan penyajian informasi yang komparatif. Informasi komparatif yang dimaksud adalah informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan.

Laporan keuangan yang disajikan sebagaimana yang diatur dalam SAK EMKM ini adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun- akun tertentu yang relevan. Informasi yang perlu ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut antara lain, nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang penyajian yakni rupiah dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Perlakuan khusus dalam laporan laba rugi, misalnya dalam sak emkm ini mengatur bahwa jika dalam koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi terdapat dampak yang muncul, maka atas dampak ini tidak dianggap sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Yang perlu menjadi perhatian, SAK EMKM ini juga mengatur transaksi yang khusus, contohnya transaksi dalam mata uang asing, pendapatan hibah, investasi pada ventura bersama, dan perubahan kebijakan akuntansi sehingga dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM ini telah mencakup hal- hal yang dibutuhkan oleh pengguna standar ini. Oleh karena itu, umkm sebagai pengguna, perlu mempersiapkan diri untuk penggunaan SAK EMKM, walaupun berlaku efektif per 1 januari 2018 namun perlu diketahui bahwa penerapan dini diperkenankan.

## **1.2 Ruang Lingkup SAK EMKM**

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (ED SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (seterusnya disebut sebagai “entitas”) sebagaimana dideskripsikan dalam bab 1 ruang lingkup. ED SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif tersebut. ED SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam bab 1 sampai dengan bab 18. jika referensi silang ke bab atau paragraf lain dilakukan, maka referensi silang tersebut hanya berlaku di antara bab-bab di dalam ED SAK EMKM ini. Dalam ED SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan.

ED SAK EMKM dilengkapi dengan contoh ilustratif laporan keuangan. Entitas dapat menggunakan contoh ilustratif laporan keuangan sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya ed sak emkm berlaku efektif tanggal 1 januari 2018, namun penerapan ini dianjurkan.

### **1.3 Ruang lingkup Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (“ED SAK EMKM”)**

ED SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. ED SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ED SAK EMKM.

#### **Konsep Dan Prinsip Pervasif**

##### *Tujuan Laporan Keuangan*

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

##### *Laporan Posisi Keuangan*

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi

mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur- unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

### **Aset**

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset.

Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

### **Liabilitas**

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif

adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- (a) Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- (b) Akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

### **Kinerja**

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- (b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas lebih lanjut dalam paragraf 2.24 dan 2.25.

### **Penghasilan**

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

- (a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- (b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

### **Beban**

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- (a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.
- (b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang

timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

### **Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 dan 2.8, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
- (b) Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

### **Manfaat Ekonomi Masa Depan**

Kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk akun-akun yang signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu populasi besar untuk akun-akun yang tidak signifikan secara individual.

### **Keandalan Pengukuran**

Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya suatu akun dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lainnya, biaya

tersebut harus diestimasi. Jika pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

### **Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ed sak emkm adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

### **Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (*miss statement*) akun-akun laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

### **Prinsip Pengakuan Dan Pengukuran Pervasif**

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada

konsep dan prinsip pervasif dari rerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam ED SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

### **Kelangsungan Usaha**

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha).

Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

### **Konsep Entitas Bisnis**

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara

jasas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

### ***Pengakuan Dalam Laporan Keuangan***

#### **Aset**

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

#### **Liabilitas**

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

#### **Penghasilan**

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### **Beban**

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### **Saling Hapus**

Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh ED SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangi hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait penyajian laporan keuangan.

### **Ruang lingkup**

Bab ini menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai persyaratan ed sakemkm dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas.

### **Penyajian Wajar**

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam bab 2 konsep dan prinsip pervasif. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam ed sak emkm tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- (a) Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- (b) Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.

- (c) Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- (d) Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

### **Kepatuhan Terhadap Ed Sak Emkm**

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap ed sak emkm membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap ED SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam ED SAK EMKM.

### **Frekuensi Pelaporan**

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

### **Penyajian Yang Konsisten**

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- (a) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan

penerapan kebijakan akuntansi dalam bab 7 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan; atau

(b) ED SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah karena penerapan paragraf 3.6 di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.

### **Informasi Komparatif**

Kecuali dinyatakan lain oleh ED SAK EMKM, entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

### **Laporan Keuangan Lengkap**

Laporan keuangan minimum terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) laporan laba rugi selama periode;
- (c) catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Karena paragraf 3.8 mensyaratkan jumlah komparatif, maka laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

### **Identifikasi Laporan Keuangan**

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bila diperlukan untuk pemahaman informasi yang disajikan:

- (a) nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan;
- (b) tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan;
- (c) rupiah sebagai mata uang penyajian; dan
- (d) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

#### **1.4 Laporan Posisi Keuangan Ruang Lingkup**

Bab ini mengatur informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan bagaimanamenyajikannya. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

##### **Informasi yang disajikan**

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang;
- (c) persediaan;
- (d) aset tetap;
- (e) utang usaha;
- (f) utang bank;
- (g) ekuitas.

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. ED SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

##### **Klasifikasi Aset Dan Liabilitas**

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

### **Klasifikasi Ekuitas**

Entitas menyajikan secara terpisah komponen ekuitas sesuai dengan bab 13.

### **Laporan Laba Rugi Ruang Lingkup**

Bab ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya.

### **Informasi Yang Disajikan**

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- (a) pendapatan;
- (b) beban keuangan;
- (c) beban pajak;

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ed sak emkm mensyaratkan lain. Ed sak emkm mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat bab 7 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan).

### **Catatan atas laporan keuangan Ruang lingkup**

Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan

dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Salah satunya yaitu adalah ikatan akuntan indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi di indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Perkembangan akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini perkembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk panitia pengumpulan bahan-bahan dan struktur gaap dan gaas. Kemudian pada tahun 1974 dibentuk komite prinsip akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite pai telah bertugas

selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama komite pai diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (komite sak), kemudian pada kongres viii, tanggal 23-24 september 1998 di jakarta, komite sak diubah menjadi dewan standar akuntansi keuangan untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. SAK yang berkualitas merupakan salah satu pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan menciptakan transparansi bagi perusahaan. Ikatan akuntan indonesia (IAI) sebagai wadah Profesi Akuntansi Di Indonesia, senantiasa berusaha untuk tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global, khususnya dalam hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah dicapai sebelumnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di indonesia:

1. Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk komite prinsip akuntansi indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip akuntansi indonesia (pai).
2. Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar pai 1973 dan kemudian menerbitkan prinsip akuntansi indonesia 1984 (pai 1984). Menjelang akhir 1994, komite standar

- akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan ias yang dikeluarkan oleh IASB.
3. Pada periode 1994-2004, ada perubahan kiblat dari us gaap ke IFRS, hal ini ditunjukkan sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari komite standar akuntansi keuangan untuk menggunakan *International Accounting Standards* sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan ias. Beberapa standar diadopsi dari us gaap dan lainnya dibuat sendiri.
  4. Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS tahap 1, sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku standar akuntansi keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 oktober 1995, 1 juni 1999, 1 april 2002, 1 oktober 2004, 1 juni 2006, 1 september 2007, dan versi 1 juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI (cek lagi nanti) x di jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh ifrs akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar ifrs pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah ifrs yang diadopsi baru mencapai 10

standar ifrs dari total 33 standar.

### **Penetapan SAK-ETAP**

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards For Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh dsak IAI pada tanggal 19 mei 2009. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: akuntan publik, akademisi, akuntan sektor publik, dan akuntan manajemen. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (UKM) (yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dimana jikalau standar ini tidak diterbitkan mereka juga harus mengikuti sak baru (yang merupakan sak yang sedang dalam tahap pengadopsian IFRS – konvergensi penuh tahun 2012) untuk menyusun laporan keuangan mereka. SAK berbasis IFRS ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya. Pada saat diluncurkannya Standar Akuntansi ETAP (SAK- ETAP) bertepatan dalam acara seminar nasional akuntansi “tiga pilar standar akuntansi indonesia” yang dilaksanakan oleh universitas brawijaya dan ikatan akuntan indonesia. Nama standard ini sedikit unik karena Exposure Draftnya diberi nama standar akuntansi UKM (usaha kecil dan menengah), namun mengingat definisi ukm sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standard ini diberi nama sak entitas tanpa akuntabilitas publik. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif,

maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan psak dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan sak-etap yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Organisasi internasional pasar modal (iosoc), dan federasi akuntansi internasioanal (ifac).badan standar akuntansi internasional (iasb) yang dahulu bernama komisi standar akuntansi internasional (aisc), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (choi et al., 1999 dalam intan immanuela, puslit2.petra.ac.id) natawidnyana(2008), menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari ifrs sebelumnya merupakan international accounting standards (ias). Ias diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh international accounting standards committee (iasc). Pada bulan april 2001, iasb

mengadopsi seluruh ias dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

### **STRUKTUR IFRS**

International financial reporting standards mencakup:

1. International financial reporting standards (ifrs) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001.
2. International accounting standards (ias) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
3. Interpretations yang diterbitkan oleh international financial reporting interpretations committee (ifric) – setelah tahun 2001.
4. Interpretations yang diterbitkan oleh standing interpretations committee (sic) – sebelum tahun 2001.
5. Framework for the preparation and presentation of financial statement ( kerangka kerja persiapan dan penyajian laporan keuangan ).

### **Konversi Ke IFRS Di Indonesia**

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di indonesia menggunakan ifrs melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan pengurus nasional IAI bersama-sama dengan dewan konsultatif sak dan dewan sak merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS. Dari data-data di atas kebutuhan indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di indonesia oleh dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan

penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh international accounting standards board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konvergensi secara penuh dengan international financial reporting standards yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini:

1. IFRS/IAS yang telah diadopsi ke dalam psak hingga 31 desember 2008
  - A. Ias 2 inventories
  - B. Ias 10 events after balance sheet date
  - C. Ias 11 construction contracts
  - D. Ias 16 property, plant and equipment
  - E. Ias 17 leases
  - F. Ias 18 revenues
  - G. Ias 19 employee benefit
  - H. Ias 23 borrowing costs
  - I. Ias 32 financial instruments: presentation
  - J. Ias 39 financial instruments: recognition and measurement
  - K. Ias 40 investment propert
2. Ifrs/ias yang akan diadopsi ke dalam psak pada tahun 2009
  - A. Ifrs 2 share-based payment
  - B. Ifrs 4 insurance contracts
  - C. Ifrs 5 non-current assets held for sale and discontinued operations
  - D. Ifrs 6 exploration for and evaluation of mineral resources

- E. IFRS 7 financial instruments: disclosures
  - F. IAS 1 presentation of financial statements
  - G. IAS 27 consolidated and separate financial statements
  - H. IAS 28 investments in associates
  - I. IFRS 3 business combination
  - J. IFRS 8 segment reporting
  - K. IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors
  - L. IAS 12 income taxes
  - M. IAS 21 the effects of changes in foreign exchange rates
  - N. IAS 26 accounting and reporting by retirement benefit plans
  - O. IAS 31 interests in joint ventures
  - P. IAS 36 impairment of assets
  - Q. IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets
  - R. IAS 38 intangible assets
3. IFRS/IAS yang akan diadopsi ke dalam PSAK pada tahun 2010
- A. IAS 7 cash flow statements
  - B. IAS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance
  - C. IAS 24 related party disclosure
  - D. IAS 29 financial reporting in hyperinflationary economies
  - E. IAS 33 earning per share
  - F. IAS 34 interim financial reporting

Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional (international accounting standard/IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar

internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Membahas tentang ias saat ini lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain adalah iasc (international accounting standard committee), perserikatan bangsa-bangsa dan oecd (organization for economic cooperation and development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan- perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta iosco (international organization of securities commissions).

### **Tujuan Ifrs**

Tujuan ifrs adalah :memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada ifrs.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

### **1.5 Manfaat Dari Adanya Suatu Standard Global**

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.

2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
3. perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarakan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

### **Penerapan Ifrs Di Indonesia**

1. Menurut sri mulyani, konvergensi akuntansi indonesia ke ifrs perlu di dukung agar indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. “kalau standar itu dibutuhkan dan akan meningkatkan posisi indonesia sebagai negara yang bisa dipercaya di dunia dengan tata kelola dan pertanggungjawaban kepada rakyat dengan lebih baik dan konsisten, tentu itu perlu dilakukan” ujarnya.
2. Menurut rudy suryanto, se, m.acc, akt (dosen program studi akuntansi umy). Sebenarnya penerapan ifrs di indonesia telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2007, namunakan diterapkan penuh tahun 2012.

Saat standard internasional tidak berbeda dengan standard nasional, maka tidak akan ada masalah. Yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standard nasional (rujukan pertama). Banyak pro dan kontra dalam penerapan standard internasional, namun seiring waktu standard internasional telah bergerak maju.

Dengan pengadopsian ifrs memang diperuntukkan sebagai

contoh bahwa dalam hidup kita memang mengalami perubahan, dan perubahan ini terjadi akibat adanya perkembangan dari segala aspek. Namun dalam mengadopsi ifrs , sayangnya masih terdapat pihak-pihak yang mungkin menentangnya, contoh alasannya adalah pemahaman yang mungkin masih dirasa kurang. Mengapa tidak, ifrs ini dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa inggris yang berarti kita harus menerjemahkannya kedalam bahasa yang sesuai dengan negara yang akan menganutnya. Dengan ini, permasalahannya adalah kita memerlukan banyak waktu untuk menerjemahkan. Serta anggapan bahwa dengan pengubahan ini menimbulkan biaya yang lumayan besar, karena inilah pengadopsian ifrs di indonesia belum berjalan.

### **Penetapan Sak-Etap**

Ikatan akuntan indonesia pada tanggal 17 juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (sak-etap) atau the indonesian accounting standards for non-publicly-accountable entities, dan telah disahkan oleh dsak IAI pada tanggal 19 mei 2009. Dewan tandar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia (dsak IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: akuntan publik, akademisi, akuntan sektor publik, dan akuntan manajemen. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (ukm) (yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dimana jikalau standar ini tidak diterbitkan mereka juga harus mengikuti sak baru (yang merupakan sak yang sedang dalam tahap pengadopsian ifrs – konvergensi penuh tahun 2012) untuk menyusun laporan keuangan

mereka. Sak berbasis ifrs ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya.

Pada saat diluncurkannya standar akuntansi etap (sak-etap) bertepatan dalam acara seminar nasional akuntansi “tiga pilar standar akuntansi indonesia” yang dilaksanakan oleh universitas brawijaya dan ikatan akuntan indonesia. Nama standard ini sedikit unik karena exposure draftnya diberi nama standar akuntansi ukm (usaha kecil dan menengah), namun mengingat definisi ukm sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standard ini diberi nama sak entitas tanpa akuntabilitas publik.

Apabila sak-etap ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti ukm tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan psak umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal sak-etap memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan psak dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan sak-etap yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup sak-etap maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

### **Penetapan Sak Emkm**

Di pertengahan tahun 2015 IAI menyusun pilar standar akuntansi keuangan (sak) yang lebih sederhana dari sak etap yaitu sak entitas mikro, kecil, dan menengah (sak emkm). Beberapa riset yang pernah dilakukan juga menemukan bahwa masih banyak umkm di indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh umkm walaupun persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam sak emkm masih didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari rerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana yang kita pelajari dalam sak konvergensi ifrs. Entitas yang laporan keuangannya telah menggunakan sak emkm sebagai pedoman, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap sak emkm dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, tentunya kepatuhan ini dapat dilihat jika entitas benar-benar telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam sak emkm ini secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa. Sesungguhnya emkm merupakan suatu bagian dari kondisi ekonomi di suatu negara. Tak terkecuali emkm yang begitu berperan terhadap perekonomian indonesia. bahwa, di negeri ini emkm memiliki jumlah yang lebih banyak daripada perusahaan terbuka. Hal ini terbukti pada saat krisis moneter tahun 1997-1998, terbukti bahwa emkm adalah penolong bagi indonesia dalam stabilisasi keadaan ekonomi yang ada. Tidak hanya itu, emkm juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Hal ini sesuai dengan uu no 2 tahun 2008 bab iii pasal v yang berbunyi: "*meningkatkan peran*

*usaha mikro, kecil, menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.“*

Dalam hal pemisahan kepentingan, dalam sak emkm perlu dipisahkan secara jelas antara entitas bisnis dan entitas lainnya sebagaimana yang tertuang dalam konsep entitas bisnis. Jika dibandingkan dengan sak lainnya, sak emkm merupakan suatu standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan emkm perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. Misalnya sak emkm murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga umkm cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Sehingga teknik pengukuran biaya persediaan digunakan metode biaya standar atau metode eceran demi mendapatkan kemudahan. Hal- hal lainnya yang terdapat dalam sak emkm ini adalah mengenai saling hapus. Saling hapus aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh sak emkm. Misalnya , jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap secara neto. Dalam menyajikan laporan keuangan, entitas menyajikan secara wajar informasi yang diungkapkan untuk mencapai tujuan relevan, representatif yang tepat, keterbandingan dan keterpahaman dengan penyajian informasi yang komparatif. Informasi komparatif yang dimaksud adalah informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan Laporan keuangan yang disajikan sebagaimana yang diatur dalam SAK EMKM ini adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode , laporan laba rugi selama periode dan

catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Informasi yang perlu ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut antara lain, nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, satuan mata uang penyajian yakni rupiah dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Perlakuan khusus dalam laporan laba rugi, misalnya dalam sak emkm ini mengatur bahwa jika dalam koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi terdapat dampak yang muncul, maka atas dampak ini tidak dianggap sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Yang perlu menjadi perhatian, sak emkm ini juga mengatur transaksi yang khusus, contohnya transaksi dalam mata uang asing, pendapatan hibah, investasi pada ventura bersama, dan perubahan kebijakan akuntansi sehingga dapat disimpulkan bahwa sak emkm ini telah mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna standar ini. Oleh karena itu, umkm sebagai pengguna, perlu mempersiapkan diri untuk penggunaan sak emkm, walaupun berlaku efektif per 1 Januari 2018 namun perlu diketahui bahwa penerapan ini diperkenankan. Hal ini setara dengan teori yang ada pada buku teori akuntansi hal 133.

## **BAB 2**

### **SEJARAH SAK DAN SAK EMKM**

#### **2.1. Sejarah Standar Akuntansi Diluar Negeri**

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa akuntansi sudah ada sejak dahulu yaitu ketika manusia melakukan transaksi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1494 muncul buku berjudul “summa de aritmatica, geometrica proportioni et propotionalita” karya dari lucas pacioli. Isi bukunya terdapat bab yang berjudul “tractatus de computies et scriptoris” yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan atau sering disebut dengan sistem kontinental.

Pengertian sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian yakni debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur sedemikian rupa agar selalu seimbang. Dari sistem ini maka menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu karena bisa menggambarkan tentang laba rugi, kekayaan serta hak pemilik perusahaan.

Perkembangan sistem akuntansi kemudian diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negaranya masing-masing. Contohnya sistem amerika serikat (sistem anglo saxon) dan sistem belanda (sistem contitental). Kemudian pada abad sekarang ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan yaitu sistem anglo saxon dikarenakan sistem ini dapat mencatat berbagai macam transaksi, dibandingkan sistem lainnya yang cukup sulit digunakan karena memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sedangkan pada sistem anglo saxon pembukuan

merupakan bagian dari akuntansi.

Standar akuntansi adalah regulasi aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun praktiknya tidak sesuai dengan standar.

Empat (4) alasan mengapa praktik tidak sesuai dengan standar yaitu :  
di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang menganut penyajian wajar (khusus yang dipengaruhi inggris) dan auditor lebih dapat melakukan pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Sedangkan di negara dengan hukum kode, profesi akuntansi cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama audit adalah memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum.

## 2.2 Enam Sistem Akuntansi Nasional

### *Perancis*

Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian ekonomi nasional menyetujui plan comptable general ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan september 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam direktif ketujuh ue terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan comptable general berisi : tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban atauran pengakuan dan penilaian daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya, contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Ciri khusus akuntansi di perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan perancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di prancis adalah : conseil national de la comptabilite atac cnc (badan akuntansi nasional) comite de la reglemetation comptable or crc (komite regulasi akuntansi) autorite des marches financiers or amf (otoritas pasar keuangan) ordre des experts-comptable or oec (ikatan akuntansi publik ) compagnie nationale des commissaires aix comptes or cncc (ikatan auditor kepatuhan nasional) di perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah.

Akuntan dan auditor perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu oec dan cnc, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduanya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di perancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui cnc dan crc dan keduanya mewakili perancis di iasb pelaporan keuangan perusahaan perancis harus melaporkan berikut ini:

- ✓ Neraca
- ✓ Laporan Laba Rugi
- ✓ Catatan atas laporan keuangan Laporan direktur
- ✓ Laporan auditor

Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di perancis. Ciri utama pelaporan di perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut:

Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi detail provisi. Detail revaluasi yang dilakukan analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo. Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis pengukuran akuntansi-

akuntansi di perancis memiliki karakteristik ganda: perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namun metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan ias 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahaan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukkan ke dalam ekuitas.

### *Jerman*

Pada awal tahun 1970-an, uni eropa (ue) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif uni eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya masuk kedalam hukum jerman melalui undang-undang akuntansi komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 desember 1985. Karakteristik fundamental ketiga dari akuntansi di jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki

status mengikat atau berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus memperhatikan hgb dan kerangka hukum kasus yang terkait. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Undang-undang tentang pengendalian dan transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut : mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi memberikan nasihat kepada kementerian kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional, seperti IASB sistem penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun untuk diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Pelaporan keuangan undang-undang akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi:

- ✓ Neraca
- ✓ Laporan Laba Rugi
- ✓ Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Manajemen
- ✓ Laporan Auditor

Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama.

Pengukuran akuntansi gas lebih ketat bila dibandingkan dengan hgb dalam hal laporan keuangan konsolidasi, menurut gas 4, metode revaluasi harus digunakan , sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan jerman sekarang dapat memilih untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan aturan jerman sebagaimana dijelaskan di atas, standar akuntansi internasional, atau gaap as. Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan dalam praktik dan para pembaca laporan keuangan jerman harus berhati-hati untuk mencari tahu standar akuntansi manakah yang digunakan.

#### *Jepang*

Akuntansi dan pelaporan keuangan di jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah jepang. Perusahaan – perusahaan jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa – yang disebut sebagai keiretsu modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan jepang. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi pemerintah

nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang – undang : hukum komersial, undang-undang pasar modal dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh kementerian kehakiman (Moj), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementerian keuangan dibuat berdasarkan undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang dunia 2 tujuan utama sel adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut:

- ✓ Neraca
- ✓ Laporan Laba Rugi Laporan Usaha

Proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba ditahan skedul pendukung perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Pengukuran akuntansi hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan sel. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan

konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.

### *Belanda*

Akuntansi di belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah. Akuntansi belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan iasb menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi regulasi di belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika undang-undang laporan keuangan tahunan diberlakukan, undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi tiga pihak (tripartit) (yang digantikan oleh dewan pelaporan tahunan pada tahun 1981). Dewan pelaporan tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, dewan tersebut memiliki anggota berasal dari

tiga kelompok yang berbedapenyusunan laporan keuangan (perusahaan) pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan) auditor laporan keuangan (institut akuntansi terdaftar belanda atau nivra) pelaporan keuangan Kualitas pelaporan keuangan belanda sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa belanda, namun dalam bahasa inggris, perancis, dan jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal berikut:

- ✓ Neraca
- ✓ Laporan Laba Rugi
- ✓ Catatan-Catatan Laporan Direksi
- ✓ Informasi lain yang direkomendasikan Pengukuran akuntansi

Metode yang digunakan adalah metode pembelian, goodwill merupakan perbedaan antara biaya akusisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai ini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan belanda memiliki flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos –pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangandalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain: kerugian akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya onsekuensi akibat restrukturisasi keuangan.

### *Inggris*

Warisan inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita

kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan benar dan wajar) juga berasal dari Inggris. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi : pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah prinsip konservatisme penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya kini.

#### *Pelaporan keuangan*

Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup:

- ✓ Laporan direksi
- ✓ Laporan laba dan rugi dan neraca Laporan arus kas
- ✓ Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui laporan kebijakan akuntansi
- ✓ Catatan atas referensi dalam laporan keuangan laporan auditor
- ✓ Pengukuran akuntansi

Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, departemen perdagangan dan perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh

perusahaan inggris diperbolehkan untuk menggunakan ifrs, selain gaap.

### *Amerika Serikat*

Akuntansi di amerika serikat diatur oleh badan sektor swasta (badan standar akuntansi keuangan/fasb), hingga tahun 2002 institut amerika untuk akuntan publik bersertifikat.

### *Regulasi dan penegakan aturan akuntansi*

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (gaap) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pelaporan keuangan Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan as yang besar meliputi:

- ✓ Laporan Manajemen
- ✓ Laporan auditor independen
- ✓ Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham) diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan catatan atas laporan keuangan perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun data kuartal terpilih.

Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan as yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan

secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama.

Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.

### *Pengukuran Akuntansi*

Aturan pengukuran akuntansi di amerika serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku di beberapa negara maju seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang.

## **2.3 Sejarah Di Indonesia**

Praktik akuntansi di indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan akuntansi ketika era penjajahan belanda, sekitar pada tahun 1642. Rekam jejak yang bisa menjelaskan terkait dengan praktik akuntansi di indonesia ditemukan sekitar tahun 1747 ketika ditemukan praktik pembukuan yang dijalankan oleh *amphioen societeit* yang berpusat di jakarta. Di era penjajahan belanda menerapkan pembukuan dengan **sistem pembukuan berpasangan** (*double entry bookeping*) sesuai dengan praktek yang dibangun lucas paciolo.

Dan pada tahun 1907 di indonesia diperkenalkan sistem pemeriksaan (auditing) untuk menyusun serta mengontrol pembukuan

perusahaan. Namun sistem ini belum bisa dilakukan oleh masyarakat indonesia sampai masa penjajahan berakhir.

Di indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental seperti sistem yang dipakai oleh belanda. Padahal sebenarnya, sistem kontinental atau bisa juga disebut pembukuan tidak sama dengan akuntansi. Pengertian akuntansi lebih luas. Pembukuan (*bookkeeping*) merupakan bagian atau elemen prosedural dari akuntansi. Perbedaan antara pembukuan dengan akuntansi adalah:

**Pembukuan** merupakan aktivitas proses akuntansi meliputi pencatatan, pengelompokan serta kegiatan lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berdasar pada data.

**Akuntansi** merupakan aktivitas analisa dan inteprestasi berdasarkan pada data informasi akuntansi.

Semakin berkembangnya sistem pembukuan dan akuntansi, indonesia seiring dengan perkembangan, pembukuan kemudian ditinggalkan. Di indonesia, perusahaan kemudian banyak menerapkan sistem akuntansi anglo saxon yang asalnya dari amerika. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi:

Tahun 1957, terjadi peristiwa konfrontasi irian barat yang melibatkan negara indonesia dan belanda sehingga berakibat seluruh pelajar indonesia yang menempuh pendidikan di belanda ditarik kembali dan dapat melanjutkan studinya kembali diberbagai negara, termasuk diantaranya amerika serikat.

Orang orang yang memiliki peran dalam perkembangan akuntansi di indonesia sebagian besar menyelesaikan pendidikannya di amerika yang kemudian membawa sistem akuntansi anglo saxon untuk diterapkan di indonesia. Dan pada akhirnya sistem ini mendominasi

penggunaannya dibandingkan sistem akuntansi kontinental di Indonesia. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan akuntansi khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon.

Pada era sekarang ini akuntansi sudah sangat pesat berkembang dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis serta keuangan global. Segala keputusan yang bersumber dari informasi akuntansi, serta pengetahuan terkait isu-isu dalam akuntansi internasional bahkan menjadi hal yang penting untuk mendapatkan interpretasi dan pemahaman yang tepat dalam komunikasi bisnis internasional.

#### **2.4 Perkembangan Pendidikan Akuntansi Di Indonesia**

Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942-1945 ketika Belanda mundur dari Indonesia, dan sampai pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari. Upaya nasionalisasi perusahaan yang dimiliki Belanda oleh pemerintahan Indonesia dan pindahnya orang-orang Belanda saat tahun 1958 mengakibatkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli di Indonesia. Pada akhirnya Indonesia menerapkan sistem akuntansi model Amerika, dan pada kenyataannya praktik akuntansi model Amerika cukup mudah berbaur dengan akuntansi model Belanda khususnya di lembaga pemerintah. Terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah institusi pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan akuntansi misalnya:

- ✓ Jurusan akuntansi di universitas Indonesia th 1952
- ✓ Institut Ilmu Keuangan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara – STAN th 1990
- ✓ Universitas Sumatera Utara pada th 1960
- ✓ Universitas Pajajaran pada th 1960

- ✓ Universitas airlangga pada th 1960
- ✓ Universitas gajah mada pada th 1964

### *Masalah Laporan Keuangan*

Pada awal tahun 1990-an, mulai muncul skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor, sehingga pemerintah mendapat tekanan untuk segera mengatasi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Kejadian kasus yang cukup menggegerkan adalah kasus bank duta. Bank duta go public pada tahun 1990, namun dianggap gagal dalam mengungkapkan kerugian yang terjadi. Bank duta juga tidak menginformasikan semua informasi kepada auditornya tentang masalah tersebut. Sialnya lagi, auditor bank duta ternyata mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (wtp) bagi organisasi bisnis tersebut.

Bagi pemerintah indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus segera diperbaiki apabila menginginkan dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang. Kemudian, jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 menambah deretan persoalan keuangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan sampai awal 1998, kebangkrutan massal, *collapsenya* sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran yang tak terkendali memaksa pemerintah bekerja sama dengan imf untuk melakukan negosiasi terkait berbagai paket penyelamat yang ditawarkan imf.

Pada masa ini, kesalahan secara tidak langsung diduga pada buruknya praktik akuntansi serta rendahnya kualitas keterbukaan informasi (transparansi). Berbagai persoalan tersebut telah mendorong pemerintah serta badan yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan

terkait regulasi laporan keuangan diantaranya:

- ✓ Pada september 1994, pemerintah melalui IAI (ikatan akuntansi indonesia) mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan (psak).
- ✓ Pemerintah bekerja sama dengan bank dunia (world bank) melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi.
- ✓ Pada tahun 1995, pemerintah menetapkan berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam undang-undang perseroan terbatas.
- ✓ Pada tahun 1995 pemerintah memasukkan kedalam undang-undang pasar modal tentang aspek akuntansi/pelaporan keuangan.

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)** merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan ikatan akuntan indonesia (IAI). Dengan kata lain, pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar

akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, ikatan akuntan indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Sejarah akuntansi di indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan perkataan lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke indonesia kendatipun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat indonesia sendiri pasti memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan pelaporan tersendiri. Misalnya saja pada jaman keemasan sriwijaya, majapahit, mataram. Zaman tersebut pasti memiliki sistem akuntansi tersendiri. Sayangnya sejauh ini penelitian mengenai hal ini masih belum dilakukan. Namun, sukoharsono (1997) menilai akuntansi masuk ke indonesia melalui pedagang arab yang melakukan transaksi bisnis di kepulauan nusantara. Berikut adalah perkembangan standar akuntansi indonesia dimulai sejak zaman belanda sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan ifrs:

### **1. Zaman penjajahan belanda**

Pada era penjajahan belanda, sekitar pada tahun 1642, jejak yang bisa dengan jelas bisa dikatakan berkaitan dengan praktek akuntansi di indonesia bisa ditemukan sekitar pada tahun 1747 ketika praktek pembukuan yang dijalankan oleh amphioen sociteyt yang

berkedudukan pusat di Jakarta. Dalam era penjajahan Belanda mengenalkan sebuah sistem double entry bookkeeping (sistem pembukuan berpasangan) sebagaimana praktek yang dibangun oleh Luca Pacioli. VOC merupakan perusahaan dagang (organisasi komersial) pertama milik Belanda yang pada masa penjajahan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis Indonesia pada waktu itu. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia awalnya menganut pada sistem kontinental seperti sistem yang dipakai oleh Belanda. Sebenarnya, sistem kontinental atau yang bisa juga disebut pembukuan tidaklah sama dengan akuntansi.

## **2. Pada tahun 1945-1955**

Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997). Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi—seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan (sekolah tinggi akuntansi negara) 1990, Universitas Padjadjaran 1961, Universitas

sumatera utara 1962, universitas airlangga 1962 dan universitas gadjah mada 1964 (soermarso 1995)-telah mendorong pergantian praktik akuntansi model belanda dengan model amerika pada tahun 1960 (adb 2003). Salah seorang dosen akuntansi senior indonesia dr. S. Hadibroto telah menulis disertasi tentang dua sistem ini dengan judul yang sudah diterjemahkan : *studi perbandingan antara akuntansi amerika dan belanda dan pengaruhnya terhadap profesi di indonesia*. Pada kesimpulan disertasinya beliau menyarankan agar indonesia lebih baik memilih sistem akuntansi amerika dibandingkan dengan sistem akuntansi belanda.

### **3. Pada tahun 1974**

Menjelang diaktifikannya pasar modal di indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI berhasil melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di indonesia dalam suatu buku "prinsip akuntansi indonesia (pai)." Pada tahun 1973.

### **4. Pada tahun 1984**

Tahun 1984. Pada masa itu, komite pai melakukan revisi secara mendasar pai 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku "prinsip akuntansi indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

### **5. Pada akhir tahun 1984**

Selanjutnya pada akhir tahun 1984 standar akuntansi di indonesia mengikuti standar yang bersumber dari iasc (international accounting standart committee).

## **6. Pada tahun 1994**

Pada tahun 1994 terjadi perubahan kiblat dari us gaap ke ifrs , hal ini ditunjukkan sejak tahun 1994 telah terjadi kebijakan dari komite standar akuntansi keuangan untuk tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari komite standar akuntansi keuangan untuk menggunakan *international accounting standards* sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan ias. Beberapa standar diadopsi dari us gaap dan lainnya dibuat sendiri. setelah berlangsung selama 10 tahun IAI kembali melakukan revisi total terhadap pai 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "standar akuntansi keuangan (sak) per 1 oktober 1994." IAI mengadopsi pernyataan *international accounting standard committee* (iasc) sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di indonesia, kemudian menerbitkan dua buah buku yaitu standar akuntansi keuangan—oktober 1994, buku 1 dan buku 2.

## **7. Pada tahun 2008**

Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang dibuat para kepala negara di london pada 2008, dewan standar akuntansi keuangan-ikatan akuntansi indonesia (dsak- IAI) telah memulai program konvergensi standar akuntansi keuangan indonesia menuju internasional financial reporting standard (ifrs) yang dikeluarkan oleh internasional accounting standar board (iasb). Program konvergensi tersebut telah berlangsung secara bertahap dan pada akhir 2012, seluruh pernyataan standar akuntansi keuangan indonesia (psak) yang jumlahnya lebih dari 60 psak telah selesai dilakukan penyesuaian

dengan mengadopsi ifrs. Saat ini ifrs telah diterapkan di lebih 100 negara di dunia yang meliputi seluruh negara dikawasan eropa dan sejumlah besar negara di kawasan asia pasifik, seperti australia, malaysia, singapura, hongkong, turki, dan sebagainya. Tren ini akan terus diikuti oleh negara-negara lain termasuk amerika serikat yang juga sedang menyiapkan konvergensi ifrs secara bertahap. Sampai dengan 2008 jumlah ifrs yang diadopsi baru 10 standar. Di indoesia psak akan dikonvergensi secara penuh ke dalam ifrs melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi. Berikut adalah gambaran ketiga tahap tersebut. Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh ifrs ke psak, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap psak yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi ifrs/ ias mencakup:

- ✓ Ifrs 2 share-based payment Ifrs 3 business combination Ifrs 4 insurance contracts
- ✓ Ifrs 5 non-current assets held for sale and discontinued operations Ifrs 6 exploration for and evaluation of mineral resources
- ✓ Ifrs 7 financial instruments: disclosures Ifrs 8 segment reporting
- ✓ Ias 1 presentation of financial statements
- ✓ Ias 8 accounting policies, changes in accounting estimates Ias 12 income taxes
- ✓ Ias 21 the effects of changes in foreign exchange rates
- ✓ Ias 26 accounting and reporting by retirement benefit plans
- ✓ Ias 27 consolidated and separate financial statements Ias 28 investments in associates
- ✓ Ias 31 interests in joint ventures Ias 36 impairment of assets
- ✓ Ias 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets Ias

38 intangible assets

- ✓ Pada 2010 adopsi ifrs/ ias mencakup : Ifrs 7 statement of cash flows
- ✓ Ifrs20 accounting for government grants and disclosure of government assistance
- ✓ Ifrs24 related party disclosures
- ✓ Ifrs29 financial reporting in hyperinflationary economies Ifrs33 earnings per share
- ✓ Ifrs34 interim financial reporting Ifrs41 agriculture

### **8. Pada tahun 2012**

Tujuan akhir dari konvergensi ifrs adalah psak sama dengan ifrs tanpa adanya modifikasi sedikitpun. Disisi lain, tanpa perlu mendefinisikan konvergensi ifrs itu sendiri, berdasarkan pengalaman konvergensi beberapa ifrs yang sudah dilakukan di indonesia tidak dilakukan secara full adoption. Sistem pengurusan perusahaan di indonesia yang memiliki dewan direksi dan dewan komisaris (dual board system) berpengaruh terhadap penentuan kapan peristiwa setelah tanggal neraca, sebagai contoh lain dari perbedaan antara psak dengan ifrs. Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sedang melakukan proses konvergensi ifrs dengan target penyelesaian tahun 2012. Ifrs menekankan pada principle base dibandingkan rule base. Indonesia telah mengadopsi ifrs secara penuh pada 2012, strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh ifrs sekaligus, tanpa melalui tahapan- tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan *pada gradual*

*strategy*, adopsi ifrs dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti indonesia. Sasaran konvergensi ifrs tahun 2012, yaitu merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan ifrs versi 1 januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012, konvergensi ifrs di indonesia dilakukan secara bertahap. Adapun manfaat yang diperoleh dari konvergensi ifrs adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan sak yang dikenal secara internasional, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

## **BAB 3**

### **USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

#### **3.1 Definisi UMKM**

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008: umkm memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - Memiliki kekayaan bersih paling banyak rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp 3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  - Memiliki kekayaan bersih lebih dari rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- ✓ Memiliki kekayaan bersih lebih dari rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ✓ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

*Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)* badan pusat statistik (BPS) memberikan definisi umkm berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

*Menurut kementrian keuangan* berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 316/kmk 016/1994 tanggal 27 juni 1994 bahwa usaha kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya firma, cv, pt, dan koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Ekonomi dan kehidupan selalu berkaitan satu sama lain. Ekonomi yang baik dapat digunakan sebagai penunjang taraf kehidupan manusia. Setiap orang tentunya menginginkan kehidupan ekonomi yang baik dan mencukupi. Segala upaya dan usaha pun dilakukan untuk mendapatkan peningkatan ekonomi. Salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah adalah umkm. Tulisan kali ini akan membahas tentang umkm. Jika anda ingin mengetahui lebih dalam tentang umkm, maka jangan lewatkan artikel berikut ini. Artikel kali ini akan membahas tentang seluk beluk umkm yang berkaitan dengan pengertiannya, tujuannya dan juga manfaatnya. Semuanya akan dibahas di sini khusus untuk anda.

Pengertian umkm yang pertama dikemukakan oleh rudjito. Beliau mengemukakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang memiliki peran yang penting dalam perekonomian indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Pengertian yang kedua dikemukakan oleh ina primiana. Beliau mengatakan bahwa 1) usaha mikro kecil dan menengah adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu; agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. 2) usaha mikro kecil dan menengah adalah pengembananagn kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemulihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi. 3) usaha kecil adalah peningkatan upaya-upayapemberdayaan masyarakat.

Pengertian umkm menurut para ahli ekonomi yang selanjutnya dikemukakan oleh m. Kwartono. Beliau mengatakan bahwa usaha kecil

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak rp. 1.000.000.000 dan milik warga negara indonesia. (adi, 2007:12). Dari pendapat-pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa umkm memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan ekonomi negara. Hal ini tentunya sangat penting bagi peningkatan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang.

### **3.2 Landasan Hukum UMKM**

Pemerintah telah memberlakukan undang- undang nomor 20 tahun2008, tentang usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) pada 4 juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan umkm di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan uu tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannyasebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan umkm. Undang-undang nomor 20 tahun 2008, tentang umkm terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk peraturan pemerintah (pp). Pertama, pasal 12 ayat (2), tentang persyaratan dan tata cara perizinan usaha bagi umkm. Kedua, pasal 16 ayat (3) tentang tata cara pengembangan umkm. Ketiga, pasal 37, tentang kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan umkm. Kelima, pasal 39 ayat (3), tentang tata cara pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam hubungan kemitraan usaha. Undang-undang ini,

auranya adalah pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi umkm dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan. Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap umkm yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

### ***Sasaran Pemberdayaan***

Undang-undang ini memberikan porsi pengaturan bersifat umum untuk semua pelaku umkm. Selain itu terdapat pula bagian pengaturan yang bersifat khusus hanya untuk pelaku usaha tertentu, yaitu usaha mikro dan kecil saja dan atau bagi usaha menengah saja. Hal ini disebabkan dasar kebutuhan dari ketiga rumpun bisnis umkm itu memang dalam tingkatan kemampuan yang berbeda sehingga perlu diatur secara berbeda.

### ***Pendekatan Pemberdayaan***

Pendekatan pemberdayaan merupakan cara yang dilakukan agar proses dan dinamika pemberdayaan mencapai tujuan secara tepat,

terukur dan dapat diterima sebagai suatu wujud capaian. Dalam konteks undang-undang ini arah pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*A. Pendekatan pemberdayaan usaha mikro berorientasi terhadap:*

- 1) Penanggulangan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja sendiri;
- 2). Pro pengurangan kemiskinan
- 3). Gender;
- 4). Penyeimbang celah (gap) atas kesenjangan dan keadilan.

*B. Pemberdayaan usaha kecil, pendekatannya berorientasi kepada:*

- 1). Orientasi pemotivasian untuk belajar berusaha;
- 2). Mendorong peningkatan investasi sektor riil;
- 3). Mendorong tumbuhnya kemandirian agar mampu berkiprah di area "pasar" yang sesungguhnya;
- 4). Memperluas kapasitas dan jangkauan pasar.

*C. Pemberdayaan usaha menengah pendekatannya berorientasi kepada upaya untuk:*

- 1). Mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha;
- 2). Meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produksi;
- 3). Mendorong perluasan pasar domestik dan ekspor;
- 4). Meningkatkan kapasitas daya serap kredit dan pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif pendanaan usaha

***Asas, tujuan dan prinsip pemberdayaan umkm***

Pada bagian ini diatur sembilan asas umkm, di mana umkm itu sendiri bertujuan memajukan diri dan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Prinsip pemberdayaan terhadap umkm merupakan pedoman dasar bagaimana umkm diberdayakan melalui: penumbuhan kemandirian, perwujudan kebijakan publik yang transparan, berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, peningkatan daya saing dan adanya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

### ***Kriteria***

Pada bagian ini ditetapkan varian kriteria UMKM, yaitu: kekayaan bersih (*net asset*) dan hasil penjualan bersih selama satu tahun. Kedua kriteria ini besaran numeriknya berbeda-beda untuk tiap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah secara metodologis, antara kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih memiliki indikator penghubung yaitu putaran kekayaan (*asset turn over*) sehingga hasil penjualan bersih sesungguhnya merupakan besaran nilai kekayaan bersih dikalikan dengan putaran aset (*asset turn over*). Lalu, bagaimana penggunaan kedua kriteria ini diterapkan dalam proses penilaian, misalnya saat pembina melakukan penilaian kemajuan umkm atau bagaimana kreditur ataupun investor menilai status umkm terkait penempatan dana? Untuk kepentingan penilaian seperti itu, maka dapat digunakan salah satu kriteria, di antara kekayaan bersih atau hasil penjualan bersih. Juga lebih lengkap dan informatif bila keduanya dijadikan media untuk mengukur sosok dari umkm tersebut.

### ***Penumbuhan Iklim Usaha***

Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi umkm selama ini. Aspek yang diatur dalam undang-undang ini agar tercipta iklim yang kondusif antara lain meliputi: pendanaan, sarana dan prasarana,

informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

### ***Pengembangan usaha***

Pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi persoalan internal yang umumnya dihadapi umkm. Pengembangan usaha terhadap umkm ini berdimensi luas serta menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu dalam bidang produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.

### ***Pembiayaan dan penjaminan***

Pembiayaan dan penjaminan merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan dan pengembangan umkm. Dalam undang-undang ini pengaturan tentang pembiayaan dan penjaminan diberlakukan berbeda antara pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan pembiayaan dan penjaminan untuk usaha menengah. Perbedaan pengaturan ini, semata-mata didasarkan atas pertimbangan kemampuan akses antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah.

### ***Kemitraan***

Dalam bagian ini diatur tentang peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memfasilitasi, dan memberikan stimulasi kegiatan kemitraan, agar kemitraan terjadi atas dasar saling membutuhkan, saling mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Pada bab v undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang umkm juga diatur mengenai berbagai bentuk dan pola kemitraan, penyelenggaraan kemitraan serta larangan dan sanksi atas pelanggaran dalam hubungan kemitraan.

### ***Koordinasi Dan Pengendalian***

Koordinasi menjadi begitu vital dalam konteks pemberdayaan umkm. Koordinasi merupakan suatu cara menciptakan kebersamaan agar tercipta sinergi atas semua unsur pelaku, sumber daya, waktu dan tenaga serta pikiran yang dicurahkan. Dalam undang-undang ini pihak yang melakukan koordinasi dan pengendalian adalah menteri yang membidangi pemberdayaan umkm. Koordinasi dilaksanakan dengan pengintegrasian kebijakan. Termasuk menciptakan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan umkm.

Berikut ini adalah list beberapa uu dan peraturan tentang ukm:

1. Uu no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
2. Pp no. 44 tahun 1997 tentang kemitraan
3. Pp no. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil
4. Inpres no. 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah
5. Keppres no. 127 tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan
6. Keppres no. 56 tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah
7. Permeneg bumn per-05/mbu/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan
8. Permeneg bumn per-05/mbu/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara
9. Undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil,

dan menengah

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

### **3.3 Perkembangan UMKM Dan Landasan Hukum UMKM** **Perkembangan usaha**

Adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Menurut Soeharto Prawirokusumo perkembangan usaha termasuk perkembangan usaha dari ukmini dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan growth stage, dan kedewasaan. Dikajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan conceptual, yaitu: Purdi E. Chandra, trik sukses menuju sukses, grafika indah, yogyakarta, 2000, hlm. 121.

Prawirokusumo Soeharto, kewirausahaan dan manajemen usaha kecil bpfe, yogyakarta, 2010, hlm. 185-188. Universitas Sumatera Utara. Mengenal peluang potensial dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah- masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi

iniilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan. analisa peluang tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya. Mengorganisasi sumber daya yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah memamanajemen sumber daya manusia dan uang. pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selajutnya. tahap ini bisa disebut sebagai tahap warming up. Langkah mobilisasi sumber daya langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya dikarenakan kurang mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang. Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 - 1998 dimana umkm ternyata memiliki ketahanan yang relatif baik ketimbang universitas sumatera utara usaha besar maka perhatian pun langsung di tujukan terhadap perkembangan umkm baik dari segi kualitas dan kuantitasnya dan mulai menunjukkan peningkatan yang cukup berarti bagi perekonomian negara di era pasca reformasi. Perkembangan umkm ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari pihak pemerintah pusat maupun daerah terutama dari ayuran-aturan yang dikeluarkan. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh umkm, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: jenis-jenis usaha tertentu,

terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu:

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi umkm, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk usaha kecil, mikro dan menengah sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro lkm yang ada, maupun non bank.
3. Perlindungan usaha <http://karyatulisilmiah.com/perkembangan-umkm-di-indonesia> diakses tanggal 21 januari 2016 26 hafsah, mohammad jafar, upaya pengembangan usaha kecil dan menengah ukm, infokop 25, jakarta, 2004, hlm. 40-44. Universitas sumatera utara melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan win-win solution.
4. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara umkm, atau antara umkm dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian umkm akan mempunyai

kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
6. Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan umkm dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi kendala umkm di lapangan. Adapun yang menjadi landasan hukum umkm adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk usaha kecil industri diatur oleh uu no. 9 tahun 1995.
  - b. Pp no. 44 tahun 1997 tentang kemitraan.
  - c. Pp no. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
  - d. inpres no.10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah.
  - e. keppres no. 127 tahun 2001 tentang bidang jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan.
  - f. keppres no. 56 tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah.
  - g. Permenneq bumh per-05mbu2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina

lingkungan.

- h. Undang-undang no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- i. Dan pp no. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **BAB 4**

### **LAPORAN KEUANGAN UMKM**

#### **4.1. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan berisi informasi sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, pemasok, kreditur, investor, pelanggan dan karyawan yang diperlukan secara tetap untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan. Dalam praktiknya laporan keuangan perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standart yang berlaku. Setiap perusahaan yang telah menerapkan manajemen pengelolaan perusahaan menuangkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan. Diantara laporan yang dibuat adalah laporan keuangan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang memungkinkan manajer untuk menelaah kinerja dari perusahaan tersebut.

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditur (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepingan lainnya. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu, laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang

diperoleh dalam suatu periode.

Kasmir (2008:7) secara umum, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Harahap (2008:105) menyatakan bahwa “laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan”. Menurut mamduh m. Hanafi dan abdul halim, dalam buku analisis laporan keuangan (2002:63), laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Dalam standar akuntansi keuangan (psak) laporan keuangan adalah: “laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47).

Menurut Sofyan s. Harahap, dalam buku analisa kritis atas laporan keuangan (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah:

1. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

2. Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak.
3. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu.
4. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

#### **4.2 Macam – Macam Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan melibatkan penggunaan berbagai macam laporan keuangan yang terdiri atas bagian tertentu mengenai suatu informasi yang penting. Sebenarnya laporan keuangan banyak macamnya, namun yang akan penulis bahas di sini hanyalah laporan keuangan yang pokok saja, yaitu neraca dan laporan rugi laba.

##### **1. laporan neraca**

Menurut mamduh m. Hanafi dan abdul halim, dalam buku analisis laporan keuangan (2002:63), neraca adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (asset), kewajiban ekonomis (hutang), modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Menurut sofyana s. Harahap, dalam buku analisa kritis atas laporan keuangan (2006:107), laporan neraca, yang disebut juga dengan laporan posisi keuangan perusahaan, adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada saat tertentu. Neraca itu sendiri mempunyai elemen-elemen antara lain sebagai berikut:

1. Aktiva (assets, harta) aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aktiva biasanya terdiri dari:

- a. Aktiva lancar. Meliputi kas dan aktiva lain yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan dengan uang tunai. Aktiva lancar disajikan di neraca berdasarkan urutan likuiditasnya, dimulai dari akun yang paling likuid. Yang termasuk dalam aktiva lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang usaha, persediaan barang dagangan, dan lainnya.
- b. Aktiva tetap merupakan aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan dan biasanya memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaatnya dimasa yang akan datang. Aktiva tetap antara lain : peralatan, mesin, bangunan, dan lainnya.
- c. Aktiva lain-lain. Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap perusahaan, antara lain : hak paten, nama baik ( goodwill ), dan lainnya.
- d. Hutang ( liabilities ). Hutang adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi oleh suatu perusahaan. Hutang biasanya terbagi menjadi:
  - (i) Hutang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang harus segera dilunasi oleh perusahaan dengan penggunaan aktiva lancar atau dengan pembentukan kewajiban lancar lainnya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang lancar adalah hutang dagang, hutang gaji, hutang biaya, serta hutang lancar lainnya.
  - (ii) Hutang jangka panjang.adalah kewajiban-kewajiban yang tidak diharapkan untuk segera dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan, tetapi pengembaliannya dilakukan dalam

jangka waktu lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang jangka panjang lainnya.

(iii) Modal. Modal pada hakikatnya adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Yang termasuk elemen dalam modal antara lain modal saham, laba ditahan, dan elemen modal lainnya.

### **Bentuk Penyajian Neraca**

Menurut Sofyan S. Harahap (2006:112), dalam menyajikan neraca dapat dibagi dalam tiga bentuk sebagai:

1. Bentuk neraca staffel atau report form. Neraca ini dilaporkan satu halaman vertikal. Disebelah atas dicantumkan total aktiva dan dibawahnya disajikan pos kewajiban dan pos modal.
2. Bentuk neraca skontro atau account form. Disini aktiva disajikan di sebelah kiri (di Inggris, di kanan) dan kewajiban serta modal ditempatkan disebelah kanan, sehingga penyajiannya sebelah menyebelah.
3. Bentuk yang menyajikan posisi keuangan (financial position form) dalam bentuk ini, posisi keuangan tidak dilaporkan seperti dalam bentuk sebelumnya yang berpedoman pada persamaan akuntansi. Dalam bentuk ini, pertama-tama dicantumkan aktiva lancar dikurangi hutang lancar, dan hasil pengurangannya diketahui sebagai modal kerja. Modal kerja ditambah aktiva tetap dan aktiva lainnya, kemudian dikurangi hutang jangka panjang maka akan diperoleh modal pemilik.

### **Laporan Laba Rugi**

Menurut A.J. Keown, Dkk, dalam buku dasar-dasar manajemen

keuangan, yang diterjemahkan oleh chaerul d. Djakman (2004:80), laporan rugi laba adalah laporan untuk periode tertentu yang terdiri atas penerimaan bersih dikurangi beban periode itu. Menurut Sofyan S. Harahap, dalam buku analisa kritis atas laporan keuangan (2006:73), laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Hasil dikurangi biaya-biaya merupakan laba atau rugi. Kalau hasil lebih besar dari biaya berarti laba. Sebaliknya, kalau hasil lebih kecil dari biaya-biaya, berarti rugi. Menurut M. Amduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku analisa laporan keuangan (2002:56), laporan laba/rugi adalah lebih meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan laba/rugi sendiri punya elemen-elemen antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban (kompensasi keduanya) selama periode tertentu, yang timbul dari penjualan barang-barang, penyerahan jasa, dan elemen pendapatan lainnya.
2. Biaya adalah kenaikan dalam ekuitas atau penggunaan selama periode tertentu yang timbul dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan lainnya.
3. Keuntungan adalah kenaikan dalam aktiva bersih yang timbul dari transaksi-transaksi atau kejadian lain dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih.
4. Kerugian adalah penurunan dari aktiva bersih yang timbul dari transaksi-transaksi atau kegiatan lain dan kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih.

## **Kelemahan Laporan Keuangan**

Menurut Sofyan S. Harahap, dalam buku *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan* (2006:17), kelemahan laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat, bukan masa kini
2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan
3. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian
4. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/ transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas)
5. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan
6. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan, umumnya diabaikan.

### **4.3 Prosedur Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan SAK EMKM**

Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI yang dimana *exposure draft* standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (ED SAK EMKM) telah disetujui Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016, dengan adanya SAK EMKM dapat membantu memudahkan pelaku UKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Meskipun SAK

emkm bisa dibilang sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan merupakan suatu bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan, yang akan memberikan dampak dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dimaksud. Menurut IAI dalam sak emkm (2016:1) entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dalam sak emkm, laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas mikro, kecil, dan menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Semua pihak sangat mengerti akan pentingnya laporan keuangan dalam usaha, tetapi kebanyakan ukm di Indonesia belum semuanya mempraktikkan akuntansi di pencatatan keuangannya, masih banyak dari mereka yang menghadapi kendala di dalam penyusunan laporan keuangan. Sak umum sendiri mungkin lebih rumit untuk dipahami bahkan untuk diterapkan bagi skala usaha kecil menengah, sehingga perlu adanya penerapan SAK EMKM bagi usaha skala kecil menengah dalam membuat laporan keuangan karena lebih mudah dipahami. Adanya SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaan diharapkan memberikan kemudahan bagi ukm dalam menyajikan laporan keuangan untuk membangun kualitas ukm dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan di implementasikannya sak emkm

terhadap ukm juga diharapkan membuat berkembangnya ukm didalam perekonomian indonesia. Sak emkm memberi kemudahan untuk ukm karena ketentuan pelaporan yang mudah di mengerti di dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya sak emkm masih banyak belum diterapkan pada pelaku ukm di indonesia dalam menyusun laporan keuangannya mengingat bahwa sak emkm merupakan standar akuntansi keuangan yang baru dikeluarkan oleh IAI khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah.

Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar menyangkut transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan (sirait, 2014:19). Menurut harrison *et al* (2012: 2) laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan dalam melaporkan hasil aktivitasnya kepada kelompok berkepentingan. IAI dalam sak emkm (2016:8-9) penyajian wajar dalam laporan keuangan sesuai persyaratan sak emkm dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas dimana penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing- masing akun-akun tersebut. Menurut IAI dalam sak emkm (2016:9) laporan keuangan entitas meliputi:

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

- Laporan laba rugi selama periode;
- Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.
- Penjelasan mengenai laporan keuangan menurut sak emkm sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) lazimnya dikenal sebagai neraca (*balance sheet*). Menurut Kartikahadi *et al* (2012:119) laporan posisi keuangan atau neraca adalah “suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu”.

Laporan posisi keuangan atau neraca mempunyai 2 bentuk format yaitu bentuk laporan (*staffel*) dan bentuk akun (*skontro*). Dalam bentuk laporan, aset dilaporkan terlebih dahulu dibagian atas kemudian dibagian bawahnya dilaporkan kewajiban dan ekuitas. Sedangkan bentuk akun, aset dilaporkan sebelah kiri sedangkan kewajiban dan ekuitas dilaporkan sebelah kanan, kewajiban di laporkan lebih dahulu baru melaporkan ekuitas dibawahnya.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:11) laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas menurut sak emkm dapat mencakup akun-akun berikut:

- Kas dan setara kas;
- Piutang;
- Persediaan;
- Aset tetap;

- Utang usaha;
- Utang bank;
- Ekuitas

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:11-12) entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Klasifikasi aset dan liabilitas

A. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

B. Entitas mengklasifikasikan yang dinilai sebagai aset lancar jika:

- 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) dimiliki untuk di perdagangkan;
- 3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

C. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

D. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang dinilai sebagai liabilitas jangka pendek adalah:

- 1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- 5) entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

## 2. Klasifikasi ekuitas

IAI dalam sak emkm (2016:28) mengungkapkan klasifikasi ekuitas sebagai berikut:

- A. Pengakuan dan pengukuran modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- B. Pengakuan dan pengukuran untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham.
- C. Pengakuan dan pengukuran untuk badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.
- D. Penyajian untuk modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

## **Laporan Laba Rugi Selama Periode**

Laporan laba rugi (*profit & loss statement/income statement*) merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dalam jangka waktu tertentu (Sirait, 2014:19). Menurut Hery (2012:111) laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk pilihan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk langsung (*single-step*)

Laporan laba rugi dengan bentuk langsung menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba/rugi bersih. Seluruh pendapatan maupun beban baik berasal dari kegiatan normal perusahaan maupun kegiatan diluar perusahaan atau pendapatan dan beban lain-lain digabungkan menjadi satu jumlah pendapatan dan beban.

2. Bentuk bertahap (*multiple-step*)

Laporan laba rugi dalam bentuk bertahap menekankan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih, dimana bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan bagian non operasi. Menurut IAI dalam Sak Emkm (2016:13) entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode .

Dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- A. Pendapatan;
- B. Beban keuangan;
- C. Beban pajak.

## **Catatan Atas Laporan Keuangan, Yang Berisi Tambahan Dan Rincian Akun-Akun Tertentu Yang Relevan.**

Laporan keuangan tidak memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan atau pemakai laporan tersebut, maka dari itu perlu adanya catatan atas laporan keuangan untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi, selain itu juga dapat menginterpretasikan angka – angka yang terkandung didalam laporan keuangan, maka dari itu pemakai juga perlu melihat catatan atas laporan keuangan agar dapat memahami asumsi-asumsi yang dipakai dalam keseluruhan laporan keuangan.

Menurut kartikahadi *et al* (2012:134) catatan atas laporan keuangan seharusnya dapat memuat informasi sebagai berikut:

- A. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- B. Informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun diisyaratkan oleh sak.
- C. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan namun relevan untuk memahami setiap pos-pos laporan keuangan.

Menurut IAI dalam sak emkm (2016:14) catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis dimana setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan memuat:

- A. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan sak emkm;

- B. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- C. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

## **BAB 5**

### **PANDUAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK UMKM**

#### **5.1. Panduan Membuat Laporan Keuangan Untuk Pemula**

Ketika memulai suatu usaha, orang sering lupa menyiapkan pembukuan alias laporan, meskipun namanya adalah laporan keuangan sederhana, padahal fungsi pembukuan ini sangat vital bagi kelangsungan sebuah bisnis. Setiap akhir tahun selalu dikejar deadline laporan keuangan dan biasanya yang sering anda alami menjelang akhir tahun adalah dengan lembur berhari-hari, stres laporan keuangan tidak kunjung selesai, kerja tergesa-gesa dan, sering ditanya kapan laporan selesai oleh manajemen. Lihatlah apa dampaknya bagi sebuah perusahaan. Perusahaan akan mengalami laporan keuangan akhir tahunnya terlambat disajikan dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta terlambat jugalah dalam mengambil keputusan strategi bisnis. Maka hasilnya akan *'LACK OF COMPETITIVE' dan Perusahaan tidak bisa bersaing.*

Berbicara tentang laporan keuangan, maka bagi orang awam tentu akan tergambar tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Begitu sangat pentingnya laporan keuangan bagi sebuah perusahaan karena selain sebagai salah satu proses pengambilan keputusan bisnis juga merupakan salah satu nyawa suatu perusahaan tentang sukses atau tidaknya perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memuat beberapa hal, diantaranya harta, utang, modal, dan semua pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang

dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sebelum membahas lebih jauh tentang cara membuat laporan keuangan sederhana, diharapkan lebih dulu untuk mengetahui tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan:

- Memberikan informasi keuangan mengenai aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan yang dapat dipercaya.
- Memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang perubahan aktiva bersih atau neto (aktiva yang telah dikurangi kewajiban) suatu perusahaan.
- Memberikan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakai laporan untuk menaksirkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

Setelah mengetahui pentingnya laporan keuangan, tentu anda harus mengerti bagaimana melakukan cara membuat laporan keuangan tersebut, setidaknya taraf yang sederhana. Intinya sih, **3M** singkatan dari '*Mari Mulai Mencatat*'. Jadi, apapun pemasukan dan pengeluaran perusahaan Anda, mulai sekarang harus dicatat. Itulah yang paling sederhana. Konon, pebisnis sekelas Bob Sadino pun dulu melakukan cara ini pada masa awal bisnisnya. Nah, bila mau belajar lebih serius dari disiplin akuntansi, ada tiga hal yang harus anda pelajari. Paling tidak anda punya *cash-flow* (aliran kas), *profit and lost* (rugi laba), serta *neraca* sederhana. Mari kita pelajari satu per satu.

## **5.2 Arus Kas**

Gampangnya, arus kas adalah catatan harian mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan dari usaha yang anda jalankan.

Pokoknya, setiap ada pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat. Catatan mengenai arus kas ini sangat penting. Pasalnya, catatan arus kas ini merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan yang lain. Jadi, dari catatan sederhana inilah suatu usaha bisa dianalisis. Sebaiknya, dibedakan buku untuk pos pengeluaran dan pendapatan. Dari catatan harian ini Anda bisa membuat rekapitulasi per bulan. Inilah yang disebut laporan arus kas (*cash-flow*). Sebelum memulai usaha, anda juga bisa membuat proyeksi aliran kas ini, yaitu perkiraan aliran kas berdasarkan asumsi-asumsi pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang hendak anda tekuni. Proyeksi aliran kas ini berguna untuk mengetahui berapa banyak modal yang harus anda setor di awal dan anda cadangkan selama usaha anda berjalan. Juga berapa lama waktu yang anda perlukan untuk bisa balik modal.

PT Karya Tangan Indonesia Crafting		
<b>Laporan Arus Kas</b>		
Periode April 2015		
<b>Aktifitas Operasional</b>		
Penjualan	Rp	300,000,000
Retur Pembelian Barang Dagang	Rp	50,000,000
Pembelian Persediaan Barang	Rp	(100,000,000)
Total Biaya & Beban	Rp	(102,000,000)
Pembayaran Pajak Usaha	Rp	(10,000,000)
<b>Arus Kas untuk Aktifitas Operasional</b>		<b>Rp 138,000,000</b>
<b>Aktifitas Investasi</b>		
Pembelian Mesin Baru	Rp	(15,000,000)
Penyewaan Kendaraan Operasional	Rp	13,000,000
Akuisisi		-
<b>Kas untuk Aktifitas Investasi</b>		<b>Rp (2,000,000)</b>
<b>Aktifitas Pendanaan</b>		
Penambahan Modal	Rp	10,000,000
Pengembalian Hutang	Rp	(20,000,000)
<b>Kas untuk Aktifitas Pendanaan</b>		<b>Rp (10,000,000)</b>
<b>Kenaikan Kas</b>	Rp	<b>126,000,000</b>
<b>Posisi Kas 1/4/2015</b>	Rp	<b>(75,000,000)</b>
<b>Posisi Kas 30/4/2015</b>	Rp	<b>51,000,000</b>

### 5.3 Laporan Rugi Laba

Berdasarkan catatan aliran kas tadi, anda bisa membuat laporan rugi laba. Intinya, laporan rugi laba ini berisi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya sehingga diketahui apakah usaha tersebut mengalami untung atau malah rugi. Tapi ingat, anda harus mengeluarkan faktor asset, modal, barang, dan utang dari laporan keuangan ini. Dalam menyusun laporan rugi laba, anda sebaiknya memasukkan unsur depresiasi. Caranya gampang. Untuk pembukuan sederhana kita bisa memakai metode garis lurus (*lihat tip*). Asumsi metode ini: kita menganggap sebuah barang mempunyai masa pakai tertentu dan nilai penyusutannya adalah pembagian antara harga pembeliannya dengan masa pakainya.

Perusahaan .....		
Laporan Laba/Rugi		
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20.....		
<b>Pendapatan usaha:</b>		
Pendapatan jasa		Rp xxxxxxxxxxxx
Pendapatan bunga		Rp xxxxxxxxxxxx
Pendapatan sewa		Rp xxxxxxxxxxxx
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<u>Rp xxxxxxxxxxxx</u>
<b>Beban usaha:</b>		
Beban gaji	Rp xxxxxxxx	
Beban listrik dan air	Rp xxxxxxxx	
Beban perlengkapan	Rp xxxxxxxx	
Beban penyusutan peralatan	Rp xxxxxxxx	
Beban umum serba-serbi	Rp xxxxxxxx	
Beban bunga	<u>Rp xxxxxxxx</u>	
	<b>Jumlah beban</b>	<u>(Rp xxxxxxxxxxxx)</u>
<b>Laba atau rugi bersih</b>		<u><u>Rp xxxxxxxxxxxx</u></u>

## 5.4 Neraca

Neraca penting dibuat setidaknya setahun sekali, untuk mengetahui nilai perusahaan Anda dari waktu ke waktu. Saat awal perusahaan, neraca perusahaan biasanya hanya terdiri dari modal awal dan utang serta aset yang diperoleh dari belanja modal tersebut. Aset termasuk sebagai aktiva, sementara utang dan modal masuk sebagai pasiva. Seiring waktu, aset perusahaan bisa bertambah, bisa pula terjadi utang-piutang, atau cadangan kas menjadi berkurang atau bertambah, dan lain-lain. Intinya, nilai perusahaan bisa saja bertambah atau berkurang karena perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian.

Perusahaan .....			
Neraca			
Per 31 Desember 20....			
AKTIVA		PASIVA	
<b>Aktiva lancar</b>		<b>Utang Lancar</b>	
Kas	Rp xxxxx	Utang usaha	Rp xxxxx
Piutang usaha	Rp xxxxx	Utang gaji	Rp xxxxx
Perlengkapan	Rp xxxxx	Komisi ditrm di muka	Rp xxxxx
Sewa dibayar di muka	Rp xxxxx		
<b>Investasi Jangka Panjang</b>		<b>Utang Jangka Panjang</b>	
Investasi saham	Rp xxxxx	Utang hipotik	Rp xxxxx
<b>Aktiva Tetap</b>		Utang obligasi	Rp xxxxx
Peralatan	Rp xxxxx		
Akumls penyusutan peralatan	(Rp xxxxx)		
Gedung	Rp xxxxx	<b>Modal Pemilik</b>	Rp xxxxx
Akumls penyusutan gedung	(Rp xxxxx)		
<b>Aktiva Tidak Berwujud</b>			
Goodwill	Rp xxxxx		
<b>Jumlah Aktiva</b>	<u>Rp xxxxx</u>	<b>Jumlah utang dan modal</b>	<u>Rp xxxxx</u>

## **BAB 6**

### **PANDUAN LAPORAN KEUANGAN UMKM**

#### **6.1. Laporan Keuangan Untuk Skala Kecil**

Ronald Clapham (1991) menyatakan bahwa usaha kecil kurang memiliki keterampilan dasar yang sebenarnya diperlukan untuk mengelola suatu usaha agar berhasil. Ditemukan ada kekurangan “*know-how*” pada usaha kecil. Kekurangan pengetahuan nampaknya terjadi di semua bidang dunia usaha, kecuali di sektor yang kecil yakni sektor produksi. Biasanya pengetahuan yang baik mengenai produk atau metode pembuatannya yang mula-mula menjadi faktor pendorong pengusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk membuka usaha sendiri. Ketiadaan pengetahuan sama sekali atau memiliki pengetahuan yang terbatas, dapat dilihat di bidang-bidang seperti pembukuan, menghitung biaya, keuangan, pengadaan dan penyimpanan barang, pengendalian stok barang, membuat jadwal produksi, pengendalian mutu, penjualan dan pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengusaha tidak memahami neraca dan laporan laba rugi sehingga tidak mampu membaca dan mengambil kesimpulan dari laporan tersebut (Ronald Clapham, 1991:101). Pengusaha tidak mampu mengendalikan dan sejauh mungkin mengurangi biaya produksinya dan sampai batas tertentu, semua kekurangan ini juga ditemukan pada banyak perusahaan menengah. Di Indonesia, banyak sekali pengusaha kecil yang tidak memiliki catatan mengenai pengeluaran dan penerimaan, tidak membedakan antara pengeluaran untuk pribadi dan pengeluaran usaha, dan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai biaya produksi.

Dalam banyak hal, nilai kekayaan fisik tidak dikenal karena tidak ada catatan inventaris di banyak perusahaan menengah (Ronald Clapham, 1991:101). Dalam bisnis skala mana pun setiap pelaku usaha memiliki kebiasaan atau cara tertentu untuk mencatat atau menuliskan sesuatu yang dipandang penting sehubungan dengan bisnis yang digelutinya. Misalnya jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, yang sifatnya mengingatkan. Para pelaku bisnis yang skala usahanya relatif kecil khususnya sektor informal memiliki kebiasaan mencatat transaksi dagang secara sederhana dan tidak lengkap. Dengan bantuan ingatan dan keterampilan, mereka dapat menghitung keuntungan tanpa melalui laporan akuntansi (Hironnymus Jati dkk, 2004). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pelaku bisnis sektor informal tidak memiliki catatan tentang transaksi bisnisnya, mereka hanya mengandalkan ingatan karena terbatasnya waktu dan tenaga yang tersedia, kemampuan yang terbatas, dan tidak memahami caranya serta dipandang belum mendesak (Jati dan Timuneno, 1997 dalam Hironnymus Jati dkk, 2004). Mereka akan meminta bantuan pihak lain menyusun laporan keuangan usahanya ketika akan mengajukan kredit ke bank atau sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan modal dari pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa usaha kecil memiliki kesadaran yang rendah dalam menyusun laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang lazim (Hironnymus Jati dkk, 2004).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelbagai pihak (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007). Informasi tersebut digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi

pihak internal, laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan digunakan salah satunya sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk perusahaan. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulanan atau tahunan.

## **6.2 Tujuan laporan keuangan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan “Standar Akuntansi Keuangan” (IAI, 2004), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
- b. Menyediakan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan.
- c. Menyediakan informasi yang menyangkut perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi-informasi dalam laporan

keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2004) telah menyebutkan beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan tertentu terhadap isi laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah:

### 1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

### 2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

### 3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

### 4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

## 5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

## 6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

## 7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

### **6.3 Penyajian Laporan Keuangan**

Bab tiga dalam *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan usaha kecil dan menengah, yaitu:

#### **a. Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar, posisi keuangan,

kinerja keuangan serta perubahan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian jujur (*faithful representation*) sebagai dampak transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan atas aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan Standar ini oleh entitas kecil dan menengah, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas kecil dan menengah. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan yang spesifik atas Standar ini tidak cukup memungkinkan bagi pemakai untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi posisi keuangan dan kinerja entitas.

#### **b. Kepatuhan Terhadap SAK UKM**

Suatu entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK UKM, membuat suatu pernyataan eksplisit yang menyatakan menerapkan Standar ini secara penuh atas kepatuhannya pada SAK UKM dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK UKM kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam Standar ini.

#### **c. Kelangsungan Usaha**

Pada saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen suatu entitas yang menggunakan Standar ini harus membuat penilaian kemampuan entitas terhadap kelangsungan usaha. Suatu entitas akan terus berlangsung kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif lain kecuali melakukan hal-hal tersebut. Ketika manajemen menyadari hal ini, dalam membuat penilaian tentang ketidakpastian

material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyiapkan laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha, fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyiapan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipandang dalam kelangsungan usaha.

#### **d. Frekuensi Pelaporan**

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan:

- (a) Akta tersebut;
- (b) Balasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan

#### **e. Penyajian Yang Konsisten**

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- (a) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang menghasilkan penyajian yang lebih tepat dengan tidak mengabaikan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ; atau

(b) Standar ini mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- ✓ sifat reklasifikasi;
- ✓ jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- ✓ alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- (a) Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- (b) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

#### **f. Informasi Komparatif**

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Standar ini (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### **g. Materialitas dan agregasi**

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap

material jika, baik secara individual maupun bersama- sama, dapat memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis yang masing-masing dapat menjadi faktor penentu.

#### **h. Laporan keuangan lengkap**

Laporan keuangan entitas meliputi:

- (a) Neraca
- (b) laporan laba rugi
- (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan mendasar periode yang lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan atas penghasilan dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Karena dalam Standar ini mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua dari setiap laporan

keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama. Entitas dapat menggunakan judul untuk laporan keuangan selain yang digunakan dalam Standar ini sepanjang tidak menyesatkan.

#### **i. Identifikasi laporan keuangan**

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangannya dan membedakan laporan keuangan tersebut dari informasi lain dalam dokumen yang sama. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- (a) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; mata uang pelaporan; dan;
- (d) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

### **6.4 Ketentuan Transisi**

Entitas menerapkan SAK UKM secara prospektif, namun entitas diperkenankan untuk menerapkan standar ini secara retrospektif. Entitas

yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- (a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam Standar ini.
- (b) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika standar ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- (c) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui dalam kerangka pelaporan keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas, tetapi merupakan jenis yang berbeda dari aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan Standar ini;
- (d) menerapkan Standar ini dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan Standar ini mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kondisi atau kejadian lain sebelum tanggal efektif standar ini diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal efektif Standar ini. Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini dianjurkan.

## **BAB 7**

### **PANDUAN LAPORAN KEUANGAN (SAK EMKM)**

#### **7.1. Panduan Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi penting yang secara bersama-sama dengan badan usaha milik negara atau swasta dalam melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Faktanya UMKM menghadapi berbagai kendala atau masalah yang disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan. Pendidikan yang diartikan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal. Menurut Harrison *et al* (2012: 2) laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan dalam melaporkan hasil aktivitasnya kepada kelompok berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Menyadari situasi dan kondisi seperti ini, maka diperlukan inovasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. UKM sedikit dipermudah dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI yang dimana Exposure Draft Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) telah disetujui Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016, dengan adanya SAK EMKM dapat membantu memudahkan pelaku UKM dalam mengaplikasikan Akuntansi pada usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Meskipun SAK EMKM bisa dibidang sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas mikro, kecil, dan menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

## **7.2 Posisi Laporan Keuangan**

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

(c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

### **Aset**

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset. Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

### **Liabilitas**

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

(a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

(b) akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset

selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

(a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

(b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas.

### **Penghasilan**

Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

(a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan,

misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

(b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak.

### **Beban**

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

(a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

(b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

## **BAB 8**

### **PANDUAN LAPORAN KEUANGAN SAK EMKM**

#### **Tahap Akhir**

#### SOAL

Transaksi september 2017 atas usaha Rumah Makan ABC milik Tn. andi adalah sebagai berikut:

1 september Tn. Andi mendirikan Rumah Makan ABC dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 40.000.000

7 september Untuk menambah kas perusahaan, Tn. andi meminjam uang ke Bank sebesar 15.000.000

8 september Perusahaan Tn. Budi membeli perlengkapan rumah makan sebesar 13.000.000 secara tunai.

9 september Tn. Andi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.700.000

17 september Tn. andi membeli perlengkapan RM dari toko CIPTA MENTARI sebesar 2.000.000 secara kredit.

19 september Tn. andi membayar hutangnya pada toko cipta mentari sebesar 2.000.000

21 september Tn. andi menerima pendapatan jasa Rumah makan 5.000.000

23 September Tn. andi membayar gaji pegawai 1.000.000

25 September Tn. andi melakukan jasa catering sebesar 1.500.000 dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian

28 September Perlengkapan Rumah Makan yang sudah terpakai sebesar 800.000

30 September Tn. andi membayar uang sewa ruko sebesar 700.000

untuk 2 bulan

**JURNAL UMUM**

**RUMAH MAKAN ABC JURNAL UMUM**

**UNTUK PERIODE SEPTEMBER 2017**

<b>Tgl</b>		<b>Akun/</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
	1	Kas		40.000.000	
		Modal			40.000.000
	7	Kas		15.000.000	
		Utang Bank			15.000.000
	8	Perlengkapan		13.000.000	
		Kas			13.000.000
	9	Prive		1.700.000	
		Kas			1.700.000
	17	Perlengkapan		2.000.000	
					2.000.000
	19	Hutang Usaha		2.000.000	
		Kas			2.000.000

21	Kas		5.000.000		
					5.000.000
23	Beban Gaji		1.000.000		
	Kas				1.000.000
25	Piutang		1.500.000		
	Pendapatan Jasa				1.500.000
28	Beban		800.000		
	Perlengkapan				800.000
7	Sewa dibayar di Muka		700.000		
	Kas				700.000
<b>Total</b>			82.700.000		82.700.000

## BUKU BESAR BENTUK SALDO

### RUMAH MAKAN ABC BUKU BESAR

#### UNTUK PERIODE September 2017

Nomor akun : 001

Akun: Kas

No	Tanggal	Penjelasan	ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	01-09-17			40.000.000		40.000.000	
2.	07-09-17			15.000.000		55.000.000	
3.	08-09-17				13.000.000	42.000.000	
4.	09-09-17				1.700.000	40.300.000	
5.	19-09-17				2.000.000	38.300.000	
6.	21-09-17			5.000.000		43.300.000	
7.	23-09-17				1.000.000	42.300.000	
8.	30-09-17				700.000	41.600.000	
<b>Total kas</b>						41.600.000	

Nomor Akun : 002

Akun: Modal

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	01-09-17				40.000.000		40.000.000
<b>Total modal</b>							40.000.000

Nomor Akun : 003

Akun: Piutang

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	25-09-17			1.500.000		1.500.000	
<b>Total</b>						1.500.000	

Nomor Akunt : 004

Akun: Perlengkapan

No	Tanggal	Penjelasan	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	08-09-17			13.000.000		13.000.000	
2.	17-09-17			2.000.000		15.000.000	
3.	28-09-17				800.000		14.200.000
<b>Total Perlengkapan</b>							14.200.000

Nomor Akun : 005

Akun: Beban Gaji

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	23-09-17			1.000.000		1.000.000	
<b>Total Beban Gaji</b>						1.000.000	

Nomor Akun : 006

Akun: Sewa Dibayar di Muka

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	30-09-17			700.000	350.000	350.000	
<b>Total Sewa diBayar dimuka</b>						350.000	

Nomor Akun : 007

Akun: Hutang Usaha

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	17-09-17				2.000.000		2.000.000
2.	19-04-14			2.000.000			0
<b>Total Hutang Usaha</b>							0

Nomor Akun : 008

Akun: Hutang Bank

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	07-09-17				15.000.000		
<b>Total Hutang Bank</b>							15.000.000

Nomor Akun : 009

Akun: Pendapatan

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	21-09-17				5.000.000		5.000.000
2.	25-04-14				1.500.000		6.500.000
<b>Total Pendapatan</b>							6.500.000

Nomor Akun : 010

Akun: Beban Perlengkapan

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	28-09-17			800.000		800.000	
<b>Total Beban Perlengkapan</b>						800.000	

Nomor Akun : 011

Akun: Prive

No	Tanggal	Penjelasan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit
1.	09-09-17			1.700.000		1.700.000	
<b>Total Prive</b>						1.700.000	

## Ayat Jurnal Penyesuaian

### RUMAH MAKAN ABC AYAT JURNAL PENYESUAIAN UNTUK PERIODE September 2017

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 September 2017	Beban Sewa	350.000	
	Sewa Dibayar di Muka		350.000
	Beban Perlengkapan	800.000	
	Perlengkapan		800.000
<b>Total</b>		1.150.000	1.150.000

*Nb: dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan.*

## Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

**RUMAH MAKAN ABC**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN SALDO DISESUAIKAN**  
**UNTUK PERIODE September 2017**

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas	41.600.000	
Piutang	1.500.000	
Perlengkapan	14.200.000	
Sewa dibayar di muka	350.000	
Modal Tuan andi		40.000.000
Hutang Bank		15.000.000
Hutang Usaha		0
Pendapatan		6.500.000
Prive	1.700.000	
Beban Gaji	1.000.000	
Beban Perlengkapan	800.000	
Beban Sewa	350.000	
<b>Total</b>	<b>61.500.000</b>	<b>61.500.000</b>

*Nb : Laporan Posisi Keuangan saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. : Laporan Posisi Keuangan saldo biasanya memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Dengan kata lain, neraca saldo, disusun setelah penyusunan buku besar dan dibuat secara sistematis, sesuai kode akun (tidak acak).*

## Laporan Laba-Rugi

### RUMAH MAKAN ABC LAPORAN LABA-RUGI UNTUK PERIODE SEPTEMBER 2017

<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa		6.500.000
<b>Beban-beban</b>		
Beban Sewa	350.000	
Beban Gaji	1.000.000	
Beban Perlengkapan	800.000	
Total Beban		(2.150.000)
<b>Laba Bersih</b>		4.350.000



*didapat dari total  
pendapatan – total beban*

## Laporan Perubahan Modal

### RUMAH MAKAN ABC LAPORAN PERUBAHAN MODAL UNTUK PERIODE September 2017

<b>Modal Awal</b>		40.000.000
Laba Bersih	4.350.000	
Prive	(1.700.000)	
<b>dPenambahan Modal</b>		2.650.000
<b>Modal Akhir (30 September 2017)</b>		42.650.000



*Dikurangi prive yang terjadi pada tanggal 9/9*

*Nb : laporan perubahan modal dibuat karena adanya perubahan modal awal yaitu hal ini terjadi karena adanya prive pada tanggal 9/9*

## Neraca

### RUMAH MAKAN ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK PERIODE SEPTEMBER 2017

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas	41.600.000		
Perlengkapan	14.200.000	Hutang Bank	15.000.000
Piutang	1.500.000		
Sewa dibayar dimuka	350.000	Modal	
		Modal Akhir	42.650.000
<b>Total Aktiva</b>	<b>57.650.000</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>57.650.000</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abubakar. 2004. *Akuntansi Untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Cikal Sakti Indonesia. Jakarta
- Ang, Robert. 1997. “Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)”, Media Soft Indonesia, Jakarta.
- Alhusain, Achmad Sani. (2014). Analisa Kebijakan Permodalan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Bali dan Sulawesi Utara). *Kajian* Vol 14 No.4.
- Ardiwidjadja, Andang K.2008. *Rangkuman Konsep Akuntansi Berbasis PSAK 27/Reformat 2007*. Bandung. Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat.
- Atkins, Allen B. *et al.* 2013. *Case Studies in Finance & Accounting*. Hyderabad. Kaizen Publications.
- Auliyah, Iim M. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik Sidoarjo. *Artikel Ilmiah*. STIE Perbanas. Surabaya.
- Apsari, E. Sri. 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan untuk Koperasi*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Baas, Timo & Mechthild Schrooten. (2006). Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economic* Vol. 27.
- Ball, Ray. And Philip Brown. 1968. An Emperical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Reseach*. PP, 159-178.

- Ball, Ray. And P. Kothari. 1991. Security Return Around Earnings Announcement. *Accounting Review*. PP, 3-18.
- Bamidele And Spencer J. Hensen. 2007. The Effect of Cooperative Thrift and Credit Societies on Personal Agency Belief : a Study of Entrepreneurs in Osun State, Negeria. *African Journal of Agricultural Reseach*. Vol. 2 PP, 678-686. University of Guelph. Canada.
- Baridwan, Zaki. 1992. Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh, BPFE, UGM. Yogyakarta
- Peri. R. Pramono. 2005. *Laporan Keuangan Perusahaan*. PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Indonesia Jakarta
- Hartoko. Alfa . 2011. *Menyusun Laporan Keuangan Untuk Usaha*. Multikom (anggota IKAPI). Indonesia. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Indonesia. Jakarta
- Gede. Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Almahira. Indonesia . jakarta
- Harahap, Sofyan, Syafri. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi Kesatu Cetakan 2. Jakarta 1999.
- Harahap, Sofyan, Syafri. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul, 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta, Oktober 1994.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, September 2007.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : DSAK IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No.8*. Jakarta : DSAK IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah*. Jakarta : DSAK IAI.
- Khafid, Muhammad, *et al.* 2009. Analisis PSAK 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha pada KPRI. Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.2 No. 1, FE UNNES.
- Munawir, S. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Martono, dan Harjito, Agus. 2008. Manajemen Keuangan, Yogyakarta: EKONISIA.
- Munawir 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Mackenzie, B dkk, 2012: *IFRS For SMEs untuk usaha kecil menengah atau entitas tanpa akuntabilitas public*, Jakarta. PT. INDEKS
- Orniati, Yuli. 2009. “Laporan Keuangan sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Tahun 14 Nomor 3 November 2009.
- Riyanto, Bambang. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Sawir, Agnes 2001. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Lukman. Manajemen Keuangan Perusahaan , Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Sadeli, Lili M., 2010. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Adrian Muluk, Muhammad. 2006. *Mengenal Potensi Usaha Koperasi*.  
<http://infobisnisq.blogspot.com/2010/02/mengenal-potensi-usaha-koperasi.html>. Download 20 Desember 2012.
- Ahra, Kim. 2012. *Teori Akuntansi*.  
<http://theearthdew.wordpress.com/tag/teori-akuntansi/>.  
Download 23 Januari

## GLOSARIUM

**Agregasi** adalah proses dalam perencanaan keuangan perusahaan di mana proposal-proposal investasi kecil dari masing-masing unit operasional perusahaan digabungkan sehingga mendapatkan sebuah gambaran besar.

**Dividen** dalam akuntansi merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Tidak semua keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan dibagi ke dalam dividen, melainkan sebagian akan digunakan lagi oleh perusahaan sebagai modal guna memperbesar usaha.

**Eksplisit Cost** berarti pengeluaran aktual perusahaan, termasuk didalamnya adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang.

**Entitas Akuntansi** merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

**Exposure Draft** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) untuk meminta komentar publik tentang standar akuntansi baru yang diusulkan, untuk meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan sebelum menjadi undang-undang.

**Konvergensi** berarti penggabungan atau pengintegrasian standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan yaitu IFRS (International

Financial Report Standart)

**Pervasif** adalah memiliki kemampuan untuk menyebar. Sebuah kesalahan penyajian disebut pervasif jika bersifat material pada lebih dari satu laporan keuangan utama.

## INDEKS

---

### *A*

aktiva · 36, 37, 40, 42, 43, 44,  
59, 74, 75, 76, 77, 88, 91  
aset · 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
16, 17, 31, 32, 64, 80, 81, 82,  
83, 91, 97, 102, 104, 105,  
106, 107

---

### *D*

debet · 34  
direktif · 36, 38

---

### *E*

eksplisit · 1, 14, 31, 97  
Ekuitas · 6, 7, 17, 82, 105, 106  
Entitas · 1, 4, 5, 11, 14, 15, 16,  
17, 18, 23, 30, 31, 80, 82, 98,  
99, 101, 103, 122, 124  
Exposure Draft · 4, 96, 103,  
122, 124

---

### *G*

goodwill · 38, 40, 43, 75

---

### *I*

intepretasi · 48  
interim · 26, 27, 46, 56

---

### *K*

komprehensif · 38, 44, 45  
kredit · 23, 30, 34, 63, 66, 69,  
70, 93, 94, 108, 116

---

### *L*

liabilitas · 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12,  
13, 16, 17, 31, 32, 80, 81, 82,  
83, 104, 105, 106

---

### *M*

mikro · 4, 5, 31, 58, 60, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 78,  
79, 80, 104

---

### *P*

pervasif · 1, 11, 13, 31, 125

---

### *R*

Regulasi · 36, 39, 40, 42, 44, 45  
representatif · 2, 32

---

### *S*

stakeholder · 61, 72

---

### *T*

transparasi · 19, 51, 57

## TENTANG PENULIS



Ahmad Mukoffi lahir di Sampang pada tanggal 6 Agustus tahun 1974. Penulis menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Widyagama Malang dengan tahun masuk 1994 dan lulus pada tahun 1998, serta menamatkan S2 di Universitas Brawijaya Malang dengan tahun masuk tahun 2002 dan lulus pada tahun 2004.

Penulis adalah Lektor Universitas Tribhuwana Tungadewi dan menjadi pengampu dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi, Auditing, Analisis Laporan Keuangan. Dalam 5 tahun terakhir, penulis memiliki pengalaman dalam 5 jenis penelitian yang berbeda pada tahun 2012 sampai 2017. Selain penelitian, penulis juga memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman dalam penulisan artikel ilmiah, menjadi pemakalah dalam seminar ilmiah, serta memiliki 2 karya buku dalam 5 tahun terakhir.



Cakti Indra Gunawan dilahirkan dari seorang Ibu yang luar biasa bernama Hj. Rr. Sri Rejeki dan memiliki seorang Ayah yang bijaksana bernama H. Mino (Pensiunan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto). Cakti dilahirkan pada Jum'at Pahing di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, pada tanggal 14 Mei 1971.

Penulis menamatkan pendidikan SD Negeri Krandegan I Banjarnegara, SMPN 1 Purwokerto, SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya, S2 Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Universitas Brawijaya dan melanjutkan S3 bidang Manajemen Migrasi Internasional atas dukungan beasiswa DIKTI dan Keith & Dorothy Mackay Postgraduate Scholarships di School of Business, The University of New England, Armidale, Australia lulus 2014.

Penulis adalah dosen di Universitas Tribhuwana Tungadewi, dan mengajar sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tahun 2016, penulis telah menghasilkan 10 (sepuluh) Buku Ajar untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 serta 4 (empat) Jurnal Nasional, 3 (tiga) Jurnal Internasional. Di samping itu, penulis juga telah memiliki Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Departemen HAKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C00201100505 Tahun 2012 tentang penemuan baru Teori Migrasi Internasional Berbasis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2015 Penulis memperoleh predikat Pemenang Lomba Buku Ajar

DIKTI dengan buku berjudul Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia. Tahun 2017 mendapatkan predikat pemenang Penelitian Dosen Nasional PPT dengan judul Model Strategi Perbankan Syariah menghadapi MEA. Penulis aktif di Seminar Nasional dan Konferensi Internasional untuk menjadi pemateri bidang Ekonomi dan Manajemen khususnya Manajemen Migrasi TKI di The University of New Castle (2012), The University of Western Sydney (2013), The Australian National University (2013), The University of New England (2015). Penulis juga menjadi Ketua Jurnal Ekonomi dan Manajemen di Universitas Tribhuwana Tungadewi serta aktif membantu masyarakat untuk belajar bahasa Inggris gratis dan strategi memperoleh beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri. Saat ini, penulis juga menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian dan Penerbitan bernama International Research and Development for Human Beings (IRDH) [www.irdhresearch.com](http://www.irdhresearch.com).



MARTA LUSITA, SE, penulis berasal dari sanggau kalimantan barat dan menetap di kota malang jawa timur karena sedang menempuh pendidikan di Universitas Tribhuwana Tunggaadewi Malang jurusan Akuntansi . Penulis lahir pada tanggal 23 maret 1996 Pada saat menulis buku ini penulis sedang berusia 21 tahun dan Buku ini merupakan buku pertama yang penulis ciptakan dengan harapan bisa membantu berbagai pihak untuk lebih mengetahui SAK EMKM.

Penulis menamatkan pendidikan SDN 04 Pengadang, SMP Negeri 01 Sekayam, SMA Negeri 02 Sekayam, S1 di Universitas Tribhuwana Tunggaadewi Malang tahun masuk 2014 dan lulus pada tahun 2018.